

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan dapat dilihat secara nyata dalam kemampuan pemanfaatan dan pengolahan sektor unggulan yang dimiliki daerah tersebut. Sektor unggulan merupakan suatu penentu kemajuan suatu daerah, dimana sektor unggulan tersebut harusnya dikembangkan demi memajukan pembangunan daerah. Sektor unggulan dapat dilihat dari keunggulan kompetitif yang dimiliki. Keunggulan kompetitif dari suatu wilayah merupakan nilai tambahan yang dapat mendorong wilayah tersebut menjadi lebih berkembang (Putra et al, 2017:110). Pembangunan daerah merupakan unsur yang penting dan harus diperhatikan baik dari pemerintah daerah itu sendiri maupun dari golongan masyarakatnya. Permasalahan utama suatu daerah dalam pelaksanaan pembangunan adalah kurang mampunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanaan yang matang dan kurang telitinya melihat potensi daerah tersebut.

Kemampuan mengidentifikasi dan memahami potensi suatu daerah merupakan salah satu tantangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah yang berdampak pada keberlanjutan pembangunan daerah. Pembangunan yang dilakukan di setiap daerah adalah salah satu usaha dalam meningkatkan pembangunan nasional. Setiap daerah di Indonesia cenderung memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerah atau wilayah. Perbedaan ini yang mengakibatkan ketimpangan antar daerah maupun antar sektor yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Penggalian potensi sumber daya antar daerah perlu dilakukan guna untuk memaksimalkan proses pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi

juga bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi persektor yang terdapat di daerah tersebut. Potensi daerah perlu digali dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menunjang pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah merupakan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah dimana terdapat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa kabupaten/kota yang membentuk kesatuan struktur pelayanan secara berhierarki yang di dalamnya terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung.

SWP di Jawa Timur terdiri dari 8 (delapan) dimana salah SWP Madiun yang meliputi: (i) Kabupaten Madiun, (ii) Kabupaten Magetan, (iii) Kabupaten Ngawi, (iv) Kabupaten Ponorogo, (v) Kabupaten Pacitan, dan (vi) Kota Madiun, dengan pusat pelayanan di Kota Madiun dimana mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri.

SWP Madiun memang bukan menjadi penyumbang kontribusi terbanyak di Jawa Timur. Penyumbang terbesar PDRB di Jawa Timur yaitu SWP Gerbangkertosusila Plus dengan rata-rata di tahun 2011-2020 sebesar 63,3% dari PDRB Jawa Timur. Namun meski demikian kabupaten kota di SWP Madiun juga turut andil dalam kontribusi PDRB Jawa Timur yaitu 4,6% dan termasuk 5 besar

penyumbang PDRB Jawa Timur. Rata-rata kontribusi PDRB secara lengkap di Jawa Timur, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1. 1
Rata-rata Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) SWP di Jawa Timur terhadap PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2020 (dalam persen)

| No | Satuan Wilayah Pengembangan | Rata - rata Total Kontribusi |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Germakertosusila Plus | 63,3 |
| 2 | Kediri | 10,8 |
| 3 | Malang Raya | 7,9 |
| 4 | Jember dan Sekitarnya | 5,0 |
| 5 | Madiun | 4,6 |
| 6 | Probolinggo Lumajang | 3,3 |
| 7 | Banyuwangi | 3,3 |
| 8 | Blitar | 1,9 |
| Total Kontribusi | | 100,0 |

Sumber : BPS (2020) diolah

Pada tabel di atas terlihat bahwa SWP Madiun masuk dalam (5) lima besar dengan kontribusi tertinggi untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Kontribusi PDRB ini disesuaikan dengan nilai PDRB yang didapat oleh Kabupaten Kota di SWP Madiun dimana suatu daerah akan mengalami tingkat keberhasilan dalam pembangunannya apabila nilai PDRB yang berhasil dicapai oleh daerah tersebut mengalami peningkatan. Gambaran data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kota di SWP Madiun beserta laju pertumbuhan ekonominya dapat dilihat pada bagian berikut.

Tabel 1. 2
PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di SWP Madiun
ADHK (miliar rupiah)

| Kabupaten & Kota di SWP Madiun | Tahun | | | Rerata PDRB 2011-2020 | Laju Pertumbuhan Per 10 tahun | | Laju Pertumbuhan Per tahun | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| | 2011 | 2015 | 2020 | | des | % | des | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Kab Madiun | 8.608,70 | 10.705,10 | 12.939,60 | 11.000,79 | 0,50 | 50% | 0,050 | 5% |
| Kab Magetan | 8.744,80 | 10.824,10 | 13.020,90 | 11.114,23 | 0,48 | 48% | 0,048 | 4,8% |
| Kab Ngawi | 8.973,30 | 11.224,00 | 13.479,70 | 11.499,74 | 0,50 | 50% | 0,050 | 5% |
| Kab Ponorogo | 9.472,20 | 11.686,20 | 14.168,60 | 12.017,54 | 0,49 | 49% | 0,049 | 4,9% |
| Kab Pacitan | 7.246,20 | 9.019,50 | 10.837,90 | 9.254,88 | 0,49 | 49% | 0,049 | 4,9% |
| Kota Madiun | 6.494,40 | 8.455,40 | 10.260,40 | 8.669,71 | 0,57 | 57% | 0,057 | 5,7% |
| Rata – rata laju pertumbuhan PDRB | | | | | 0,50 | 50% | 0,050 | 5% |

Sumber: BPS (2020) diolah

Kesimpulan yang di peroleh dari tabel tersebut adalah dimana dapat dilihat rata-rata laju pertumbuhan PDRB pada kabupaten dan kota di SWP Madiun adalah 50% dari tahun 2011 – 2020. Hal ini dapat diartikan rata-rata laju pertumbuhan pertahunnya dari 2011-2020 adalah 5%. PDRB pada kabupaten kota di SWP Madiun mengalami peningkatan dari hasil perhitungan tersebut, dimana hal ini memberikan fakta bahwa PDRB di kabupaten kota di SWP Madiun tumbuh dengan baik.

Nilai PDRB dan laju pertumbuhan PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada. Selain hal itu, besar kecilnya nilai PDRB juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Penelitian Tyas (2018) di Jawa Timur mengemukakan bahwa angkatan kerja dan PMDN (investasi) mempengaruhi nilai PDRB suatu daerah. Penelitian kedua disampaikan oleh Wikaningrum (2021) bahwa pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi nilai PDRB di Jawa Timur. Daniar (2016) dalam penelitiannya di Jawa Timur menyampaikan bahwa Tenaga Kerja juga berpengaruh terhadap PDRB.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai PDRB suatu daerah adalah melihat berbagai potensi untuk menganalisis sektor unggulan serta menganalisis pergeseran struktur perekonomian yang dimiliki oleh suatu daerah agar menarik minat para investor dan terbukanya lapangan pekerjaan. Analisis ini diharapkan nantinya dapat menjadi penelitian yang menghasilkan output yang dapat digunakan untuk mengembangkan wilayah Kota & Kabupaten di SWP Madiun meliputi Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Dengan demikian, apabila penelitian sektor unggulan ini dapat dikembangkan dengan optimal maka secara tidak langsung akan memiliki benefit untuk daerah tersebut. Perkembangan yang diharapkan bukan hanya terjadi sesaat tetapi dapat mempunyai dampak yang tetap seperti terangsangnya sektor basis yang menjadi keunggulan wilayah masing-masing (Putra et al., 2017).

Penunjang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang dapat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat dari PDRB di wilayah masing-masing. Sektor ekonomi yang terdapat dalam pokok bahasan PDRB dapat menjelaskan dimana sisi unggul suatu daerah dan sektor apa yang nantinya menjadi sektor unggulan dalam daerah tersebut dengan tujuan daerah tersebut menjadi daerah mandiri dan maju. Hal ini dapat dilakukan dengan pemetaan dalam mengelompokkan sektor unggulan untuk digunakan sebagai arah dalam pembangunan ekonomi di kabupaten kota SWP Madiun. Hal tersebut akan membantu mewujudkan daerah dengan masyarakatnya yang sejahtera.

Pengelolaan sektor unggulan yang baik di suatu daerah dalam era revolusi industri 4.0 harus mulai tergerakkan, hal ini yang nantinya membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan pemanfaatan sektor yang termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu sebagai pilihan strategi memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna

meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui pertumbuhan PDRB di masing masing daerah di SWP Madiun.

Sektor Industri Kreatif yang disebutkan dalam Kemenparekraf ada 17 (tujuh belas) yaitu (i) Pengembang Permainan, (ii) Kriya, (iii) Desain Interior, (iv) Musik, (v) Seni Rupa, (vi) Desain Produk, (vii) Fesyen, (viii) Kuliner, (ix) Film Animasi Video, (x) Fotografi, (xi) DKV, (xii) Televisi dan Radio, (xiii) Arsitektur, (xiv) Periklanan, (xv) Seni Pertunjukan, (xvi) Penerbitan, dan (xvii) Aplikasi dimana masing masing sektor ini harus mulai dikembangkan dalam SWP Madiun melalui sektor unggulan yang telah terkaji dalam penelitian ini agar pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Prajanti et al., (2021) dalam kajiannya tentang ekonomi kreatif di Kota Semarang memberikan pernyataan bahwa 17 (tujuh belas) sektor tersebut menyatu dengan sektor ekonomi induknya berdasarkan lapangan usaha sebagai contohnya sektor perdagangan, transportasi, jasa, perhotelan, industri digital yang mulai berubah ke transaksi secara daring.

Prajanti et al., (2021) juga menyebutkan bahwa terdapat permasalahan yang menjadi fokus untuk diselesaikan adalah belum optimalnya pengelolaan potensi produk-produk unggulan daerah guna meningkatkan kualitas daya saing daerah. Jika dijabarkan lebih detail, maka permasalahan yang menjadi dasar rendahnya produk unggulan daerah antara lain, (1) masih rendahnya daya saing produk unggulan daerah, (2) masih rendahnya iklim berusaha, (3) masih terbatasnya akses permodalan usaha, (4) masih belum optimalnya insentif untuk menarik investasi, (5) masih tingginya ketergantungan akan potensi sumber daya alam, dan (6) belum tumbuhnya industri kreatif. Hal ini tentu sejalan dengan upaya pengembangan ekraf yang perlu difokuskan pada potensi lokal dan produk unggulan daerah. Hal ini harus dijadikan dorongan untuk SWP Madiun untuk dapat menemukan sektor unggulan agar dapat terarah potensi dan sumber daya daerahnya.

Beberapa kajian yang sejalan dengan penelitian ini di berbagai daerah dalam menganalisis sektor unggulan dan pergeseran struktur ekonomi daerah dilakukan oleh Pribadi (2021); Irmansyah (2019); dan Basuki & Mujiraharjo (2017).

Penelitian pertama oleh Pribadi (2021) di Kabupaten Lampung Tengah dengan pendekatan LQ dan DLQ untuk menganalisis sektor unggulan kemudian di dapat hasil berupa sektor basis di Kabupaten Lampung Tengah yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Sektor yang di nilai prospektif di Kabupaten Lampung Tengah yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Konstruksi. Analisis sektor unggulan berupa gabungan LQ dan DLQ dilakukan dalam penelitian ini, menghasilkan 2 (dua) sektor yang dinilai basis prospektif yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Konstruksi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa minimnya nilai pertumbuhan ekonomi dari sektor basis menunjukkan tingkat daya saing Kabupaten Lampung Tengah yang masih rendah. Keadaan ini perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Analisis kedua yang dikemukakan oleh Pribadi (2021) tentang pergeseran struktur ekonomi di Lampung Tengah yaitu adanya 3 pengaruh yaitu: laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mampu memberikan pengaruh sebesar kurang dari 5,96 miliar rupiah atau sekitar 93 % terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Lampung Tengah. 7% lainnya di pengaruhi oleh efek daya saing sebesar 0,69 miliar dan efek bauran industri yang tidak memberikan pengaruh secara positif terhadap Kabupaten Lampung Tengah, melainkan pengaruh negatif sebesar 0,25 miliar rupiah sehingga dapat disimpulkan bahwa laju perkembangan bauran industri Kabupaten Lampung Tengah mengalami perlambatan.

Penelitian kedua oleh Irmansyah (2019) di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur juga menggunakan pendekatan LQ, DLQ. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sektor unggulan berdasarkan hasil analisis gabungan LQ dan DLQ yang dimiliki Kabupaten Mojokerto adalah Sektor Industri Pengolahan. Hal ini mengingat pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya meningkatkan PDRB agar lebih mengutamakan pengembangan sektor unggulan yaitu sektor industri pengolahan. Sektor pengolahan sebagai sektor unggulan memiliki

kontribusi tinggi dalam perekonomian Kabupaten Mojokerto, sehingga perlu mendapatkan prioritas pengembangan dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya, sehingga dalam jangka pendek, menengah atau panjang dapat memberikan dampak yang tinggi pula bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Hasil kedua dikemukakan oleh penelitian ini bahwa atas analisis *shift share* diperoleh pertumbuhan PDRB di Kabupaten Mojokerto sebesar 2.529,595 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi besar oleh laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur sebesar 20.036,748 miliar.

Penelitian ketiga yang sejalan dengan penelitian ini diungkapkan oleh Basuki & Mujiraharjo (2017) yang menganalisis sektor unggulan dengan alat analisis berupa LQ dan DLQ yang menghasilkan sektor basis di Kabupaten Sleman yaitu: Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, dan Jasa Pendidikan sementara sektor yang dinilai prospektif yaitu: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Penelitian ini juga menyampaikan perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Sleman menggunakan alat analisis berupa *Shift Share* bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY berpengaruh sebesar 94,57% terhadap perekonomian yang ada di Kabupaten Sleman. Efek bauran industri juga mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Sleman sebesar 0,99% dan 4,44% lainnya dipengaruhi oleh efek daya saing dengan Provinsi DIY. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perekonomian Kabupaten Sleman mengalami pergeseran secara positif sejumlah 5.442.415,700 Juta Rupiah atau PDRB Kabupaten Sleman tumbuh sebesar 5.442.415,7 Juta Rupiah dari tahun 2011-2015.

Penelitian-penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya berhasil mengungkapkan sektor unggulan maupun pergeseran struktur ekonomi suatu daerah yang diteliti dengan baik serta saran yang dapat sebagai output dapat

dijadikan acuan. Dengan menganalisis kegiatan ekonomi, dan berpacu pada penelitian yang terdahulu diharapkan penelitian atas sektor di suatu daerah dapat dikemukakan sebagai sektor unggulan daerah serta memperhatikan pergeseran struktur perekonomian yang di gunakan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dengan menggunakan alat analisis LQ dan DLQ sebagai penentu sektor sektor unggulan, serta *Shift Share* digunakan untuk melihat pergeseran struktur perekonomian.

Oleh sebab itu, maka perlu adanya penelitian perencanaan pembangunan yang berorientasi pada sektor unggulan daerah di SWP Madiun menggunakan pendekatan serupa yaitu LQ dan DLQ serta *Shift Share* sehingga mampu meningkatkan perekonomian. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DI SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR”**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah SWP Madiun, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi sektor ekonomi unggulan di kabupaten dan kota di SWP Madiun Provinsi Jawa Timur?
 - a. Apa yang termasuk sektor basis dan non basis di kabupaten dan kota di SWP Madiun
 - b. Apa yang termasuk sektor prospektif dan non prospektif di kabupaten dan kota di SWP Madiun
 - c. Bagaimana klasifikasi sektor di kabupaten dan kota di SWP Madiun serta penerapan industri ekonomi kreatif yang ada di SWP Madiun.

2. Bagaimana pergeseran struktur perekonomian di kabupaten dan kota SWP Madiun di Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Kota Satuan Wilayah Pengembangan Madiun di Provinsi Jawa Timur.
 - a. Menggunakan alat analisis LQ untuk menentukan sektor basis non basis di kabupaten dan kota di SWP Madiun.
 - b. Menggunakan alat analisis DLQ untuk menentukan sektor prospektif dan non prospektif di kabupaten dan kota di SWP Madiun.
 - c. Menggunakan alat analisis kombinasi LQ dan DLQ untuk menentukan klasifikasi sektor di kabupaten dan kota di SWP Madiun.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Kota SWP Madiun di Provinsi Jawa Timur menggunakan alat analisis *Shift Share*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi serta bahan pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Kota di Satuan Wilayah Pengembangan Madiun di Provinsi Jawa Timur dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Akademisi:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian terkait.